

Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat

Wangsit Supeno

Program Studi Komputer Akuntansi
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta
Jalan RS. Fatmawati No. 24 Jakarta, Indonesia
e-mail: wangsit.wss@bsi.ac.id

Abstract - Rural Bank (BPR) is a bank financial institution having intermediation function. Its main activity is to raise public funds and redistribute it in the form of credit to the community. Bank Perkreditan Rakyat in distributing credit must have a source of funds that can meet the operational needs, both for the purposes of lending, payment of liabilities to customers and other operations. The largest source of Rural Bank funds to date comes from public savings, in the form of time deposits and savings. The source of funds from this society is needed by Rural Bank in increasing the amount of credit distribution. With the increase in the number of loan disbursements, it can have an impact on the increase in the amount of income and profit. The results of research and data analysis sourced from the Financial Services Authority (OJK), from 2014 to June 2017 showed the performance of Rural Banks in fund raising and fund distribution in the form of credit is assessed to experience an ever-increasing growth, so Rural Banks can continue to improve cooperation dengan customers and can increase public confidence. Deposit Guarantee Program from Deposit Insurance Agency (LPS) is very helpful to increase public and customer trust to Rural Banks. With the increasing availability of funds, the People's Credit Bank has the potential to increase lending to the community in a healthy way.

Key word :Performance, Funds, Credit

I. PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan perbankan yang memiliki fungsi intermediasi dengan kegiatan utama menghimpun dana simpanan dari masyarakat, berupa Tabungan dan Deposito berjangka, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Dengan semakin meningkatnya ekspansi penyaluran kredit BPR dengan jenis modal kerja, investasi dan konsumtif kepada masyarakat, maka kebutuhan akan dana untuk ketersediaan likuiditas operasional BPR juga semakin besar.

Sumber pendanaan operasional BPR terdiri atas dana intern dan Ekstern. Sumber dana sendiri atau intern berasal dari modal yang meliputi setoran modal para pemegang saham BPR yang besaran setoran modal minimalnya disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditambah dengan jumlah cadangan dan laba baik tahun lalu maupun tahun berjalan. Sedangkan sumber dana BPR dari eksternal berasal dari masyarakat atau disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Selain itu sumber dana eksternal bersumber dari Pinjaman baik dengan bank lain atau pihak lain non bank. Terdapat sumber dana lainnya yang berupa titipan sementara dari kegiatan transaksi yang belum selesai dan dananya masih mengendap seperti kewajiban segera.

Adanya kebutuhan dana operasional yang terus meningkat, maka manajemen beberapa BPR selain mengandalkan pada sumber dana dari simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), maka sumber penyediaan dana operasional BPR yang

cukup diandalkan adalah berasal dari pinjaman dengan bank lain. BPR mendapatkan fasilitas pinjaman Modal Kerja dari beberapa bank umum dalam bentuk program *linkage*. Kerjasama ini membantupenyediaan kebutuhan dana operasional BPR, terlebih BPR-BPR yang tergolong ekspansif dalam penyaluran kredit dan peningkatan asset, sebab jika bertumpu keseluruhannya pada dana sendiri dari Permodalan dan Simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga, BPR akan mengalami hambatan dalam penyediaan kebutuhan dana untuk penyaluran kredit.

Hal yang perlu mendapat perhatian manajemen BPR dalam penyediaan dana operasional adalah biaya dana yang akan menjadi beban BPR, yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional BPR dan suku bunga kredit yang akan ditawarkan. Selain itu, sesuai Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kegiatan utama BPR adalah menghimpun dana simpanan masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka. Kedua sumber dana simpanan tersebut merupakan bagian penting dalam struktur pendanaan BPR yang harus terus ditingkatkan agar operasional BPR lebih efisien dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu dalam penyaluran kredit BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko yang baik, sebab BPR harus bertanggung jawab atas penyediaan dana untuk kebutuhan pengembalian dana simpanan nasabah dan juga untuk pengembalian pinjaman kepada kreditur baik antar bank maupun non bank atas dana yang telah diterima BPR.

Maksud dari penulisan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis lebih jauh mengenai kinerja penghimpunan dana operasional BPR untuk

meningkatkan penyediaan dana penyaluran kredit yang merupakan studi kasus di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, di mana data penelitiannya digunakan bersumber dari Laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan penelitian sesuai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja penghimpunan Dana BPR secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017.
2. Untuk mengetahui kinerja penyaluran kredit BPR secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017.

Tujuan penelitian sesuai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja penghimpunan Dana BPR secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017.
2. Bagaimana kinerja penyaluran kredit BPR secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 ?

1.1. Penghimpunan Dana

Lembaga Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR konvensional sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana di maksud di atas.

Menurut (Triandanu, 2006) kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan

dengan cara-cara tertentu sehingga sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.

Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi antara lain hal-hal berikut :

1. Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Gambaran sebuah bank secara umum di mata masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Banyak faktor yang dapat memengaruhi gambaran sebuah bank di mata masyarakat, seperti pelayanan, keadaan keuangan, berita-berita di mass media tentang bank tersebut, dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat pada sebuah bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan bank tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan efisien dan sesuai rencana penggunaan dananya.
2. Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh (*expected rate of return*) oleh penyimpan dana lebih tinggi dibanding pendapatan dari alternatif investasi lain dengan tingkat risiko yang seimbang. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperkirakan oleh calon penyimpan dana ini, maka semakin rendah sebuah bank untuk menarik dana dari calon penyimpan dananya.
3. Risiko penyimpanan dana. Apabila sebuah bank dapat memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah diperjanjikan, maka masyarakat semakin bersedia untuk menempatkan dananya di bank tersebut.
4. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana. Pelayanan yang baik akan membuat penyimpan dana merasa dihargai, diperhatikan dan dihormati, sehingga merasa senang untuk terus bertransaksi keuangan dengan bank tersebut. Pelayanan ini bisa berupa pelayanan dari petugas bank, pemberian hadiah, atau pemberian fasilitas yang lain.

Menurut (Triandanu, 2006), pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk meng-himpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu :

1. Dana sendiri

Meskipun untuk suatu usaha bank proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivasnya, namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Begitu pentingnya proporsi dana sendiri dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR). Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*-CAR). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri akan dengan cepat habis untuk menutup

kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat sangat diragukan. Kemampuan bank untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat juga menjadi diragukan. Penurunan kemampuan ini sangat mungki untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap suatu bank ini selanjutnya sangat membahayakan kelangsungan usaha bank itu.

2. Dana dari Deposan

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan. Mengingat, menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, maka sumber dana masyarakat yang bisa diterima hanya tabungan dan deposito berjangka. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui antarbank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah tabungan. Cara-cara tersebut antara lain : hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, dan fasilitas kartu ATM. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas unjuk. Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangkanya diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (*automatic roll over – ARO*) atas deposito berjangka tersebut. Bunga atas deposito berjangka ini dapat ditarik tunai setiap jangka waktu tertentu ataupun ditransfer ke suatu rekening tabungan untuk menampung bunga atas deposito tersebut serta juga untuk menampung dana deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi. Bank-bank tertentu juga memberikan fasilitas agar bunga deposito yang tidak ditarik oleh pemiliknya dapat ditambahkan dalam simpanan pokok deposito, sehingga nilai deposito berjangkanya bertambah besar. Pada dasarnya sebelum jatuh tempo, simpanan ini tidak dapat ditarik, namun apabila deposan tetap menginginkan penarikannya sebelum jatuh tempo,

maka biasanya bank mengenakan denda atau biaya administrasi atas penarikan tersebut. Kelebihan dana deposito ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang kapan dana itu akan ditarik, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sebagai konsekuensi dari kelebihan tersebut, maka bank harus membayar dana ini dengan tingkat bunga yang relatif besar dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk yang lain. Dengan kata lain simpanan dalam bentuk deposito berjangka tidak bisa disebut sebagai sumber penghimpunan dana bagi bank yang murah. Di sisi deposan, nasabah cenderung lebih menyukai menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk deposito berjangka sesuai jangka waktu yang diinginkan karena simpanan ini menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi.

3. Dana Pinjaman

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain berupa Pinjaman antar bank. Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

4. Sumber Dana Lain

Selain sumber dana dapat berasal dari dana sendiri, dana deposan dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana bank dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Menurut (Riyadi) sumber dana lain dapat berupa Kewajiban segera yang dapat dibayar, yaitu semua kewajiban rupiah yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso keluar yang belum dibayar dan semua kewajiban bank kepada Pemerintah Pusat, seperti Pajak Penghasilan yang belum disetor dan kewajiban pajak lainnya di mana bank yang bersangkutan bertindak sebagai Wajib Pungut Pajak (WAPU) yang harus segera disetorkan ke Kas Negara.

Menurut (Ali, 2004) Pertumbuhan aset bank pertama-tama akan ditentukan oleh keberhasilan bank dalam menghimpun dana, apakah dana dari permodalan bank sendiri atau sumber dana dari pihak ketiga (DPK). Makin besar modal suatu bank, maka makin tinggi pula *leverage* yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana dari pihak ketiga yang memungkinkan bank memperbesar

earningasset-nya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank.

Namun demikian, perlu diwaspadai pula adanya berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank. Kelompok risiko berupa *financial risk* merupakan risiko yang dihadapi oleh bank dalam upayanya menghimpun dana tersebut. Berapa besar dan luasnya risiko yang dihadapi dalam menghimpun dana tersebut dipengaruhi oleh jenis sumber dana yang diterima bank. Sumber-sumber dana yang berbeda memberikan risiko yang berbeda pula. Sehingga, ada berbagai aspek perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh pemilik bank dalam upayanya menghimpun dana pihak ketiga itu, yang mencakup pertimbangan-pertimbangan dari segi likuiditas, tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko modal, risiko pasar serta risiko nilai tukar. Dalam kaitan itu, dikenal apa yang disebut dengan “operasi kredit pasif”, yaitu kiat-kiat yang dilakukan bank untuk menarik dana dari masyarakat dan “operasi kredit aktif” yaitu berupa kiat-kiat yang dilakukan oleh bank untuk mengelola dana yang berhasil dihimpunnya dengan melakukan penempatan dana secara aman dan menguntungkan.

1.2. Strategi Penghimpunan Dana

Menurut (Ali, 2004) dalam upaya untuk menghimpun dana, bank perlu menetapkan strategi dalam penghimpunan dana. Strategi pendanaan atau *funding strategy* ini dilaksanakan dengan menggunakan konsep-konsep pemasaran dana bank yang meliputi upaya untuk :

1. Menelusuri apa yang menjadi kebutuhan nasabah yang juga sejalan dengan strategi operasional bank.
2. Melakukan komunikasi yang efektif terhadap potensi nasabah bank, sehingga target pemasaran bank dapat dicapai.

Untuk itu bank perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan dan pengembangan produk-produk pendanaan, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan nasabah, penetapan jenis produk dan pengembangannya, baik yang merupakan *individual product* maupun yang merupakan *line product*. Gagasan dalam menetapkan dan mengembangkan produk yang didasarkan pada hasil identifikasi itu dapat diperoleh dari pemikiran karyawan bank sendiri, dari dewan direksi bank, modifikasi dari produk yang dilancarkan oleh bank-bank pesaing, media massa serta dari lembaga-lembaga keuangan lainnya.
2. Penetapan segmentasi pasar yang meliputi sektor-sektor pasar tertentu yang akan digarap, penciptaan produk-produk baru serta target waktu pemasaran yang dinilai paling efektif. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peniruan dari bank lainnya, maka bank harus telah menyiapkan pula diferensiasi atas produk.
3. Bank perlu melakukan pengembangan jasa

keuangan yang sejalan dengan pengembangan produk, dalam rangka menghadapi persaingan dari lembaga keuangan lainnya yang mungkin memasyarakatkan pula jenis produk yang sejenis. Dalam kaitan ini, penguasaan bank atas penerapan sistem teknologi informasi sebagai penunjang utama kegiatan operasional bank merupakan persyaratan mutlak yang harus dapat dipenuhi oleh bank.

4. Modifikasi atas produk bank dan pengembangan citra bank. Produk-produk bank baik menyangkut produk pendanaan maupun produk jasa layanan serta produk penempatan dana bank, tidak dapat dilakukan secara eksklusif mengingat cepatnya terjadi peniruan dengan berbagai cara modifikasi yang dilakukan bank pesaing. Dengan demikian bank harus senantiasa siap dengan modifikasi atas berbagai jenis produk yang dilancarkannya. Namun hendaknya dalam pengembangan dan modifikasi yang dilakukan itu sejalan dengan pengembangan citra bank secara spesifik. Artinya, bank tetap dapat dibentuk gambaran citra yang khas yang menjadi cirinya, apakah menyangkut trade mark atau brand name atas sesuatu produk yang dilancarkannya, semboyan atau slogan serta bentuk-bentuk layanan khas lainnya.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) umumnya konsumen dalam menyimpan uangnya di bank terdiri dari tiga alasan sebagai berikut :

1. Keamanan Menyimpan
Ini merupakan motivasi paling banyak dan paling penting dari nasabah ketika menyimpan dananya di bank. Dalam teori Maslow, ini merupakan motivasi untuk memenuhi kebutuhan safety. Motivasi ini muncul karena seseorang tidak mungkin menyimpan uangnya secara terus menerus di dalam rumah. Produk dana yang sering dipersepsikan dengan motivasi ini biasanya adalah Tabungan dan Giro.
2. Investasi
Alasan berikutnya adalah seseorang memerlukan produk dana dalam rangka untuk berinvestasi yang tentunya dengan harapan adanya imbal balik sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya konsumen dengan motivasi ini memiliki kelebihan dana yang relatif cukup besar sehingga mereka menginginkan sesuatu yang relatif lebih menghasilkan dibandingkan dengan hanya menyimpan saja. Produk dana yang biasanya sering ditawarkan bank untuk alasan ini adalah Deposito. Hal tersebut menjelaskan kenapa produk Deposito memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk dana yang lainnya namun juga memiliki konsekuensi persyaratan jangka waktu apabila nasabah ingin mengambil dananya di deposito.
3. Kenyamanan Transaksi Pembayaran
Selain kedua alasan tersebut di atas, motivasi lainnya yang terus berkembang adalah untuk alasan kenyamanan ketika konsumen harus melakukan transaksi pembayaran. Pengembangan

produk dan layanan dana untuk mengakomodasi kenyamanan transaksi tersebut terus dilakukan oleh bank saat ini seiring dengan perkembangan teknologi. Kenyamanan yang dimaksud di sini juga memiliki banyak dimensi seperti kemudahan, kecepatan, keleluasaan dan bahkan juga dimensi *prestige*. Produk yang dipersepsikan dengan kenyamanan transaksi ini biasanya adalah Tabungan Bisnis, Kartu Debit, Mobile Banking dan lain sebagainya.

1.3. Penyaluran Kredit

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut (Triandanu, 2006) salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalur-kan dana kepada masyarakat. Penerimaan yang utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung risiko yang relatif lebih tinggi daripada aktiva yang lain. Ditinjau dari segi likuiditasnya, penyaluran kredit mempunyai tingkat likuiditas yang lebih rendah daripada cadangan primer dan sekunder. Lebih lanjut likuiditas penyaluran kredit juga bervariasi tergantung pada jangka waktu kredit, dan kolektibilitas atau kemungkinan tertagihnya.

Menurut (Soedarto, 2007) usaha pokok bank adalah memberikan kredit tercermin dari hampir 70% - 80% assets bank berbentuk kredit yang diberikan. Demikian pula pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan perkreditan berupa pendapatan bunga dan provisi kredit. Bank yang menghadapi risiko kredit yang besar ditandai dengan besarnya kredit *non performing* atau kredit bermasalah akan menghadapi memburuknya *cash in flow* yang dampaknya dapat menimbulkan risiko likuiditas dan risiko lainnya. Penyebab timbulnya risiko kredit dapat terjadi karena faktor intern dan faktor ekstern. Kegagalan pemberian kredit BPR selama ini menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah lemahnya manajemen perkreditan di samping penyebab ekstern yang disebabkan oleh nakalnya nasabah, gagalnya usaha, dan tidak diketahuinya lokasi nasabah bersangkutan. Dengan meningkatnya persaingan yang dihadapi perbankan dewasa ini, membuat lingkungan perbankan menjadi risiko tinggi dalam pemberian kredit dan terbatasnya nasabah-nasabah yang layak untuk diberikan kredit. Beberapa manajemen bank mencari beberapa strategi antara lain dengan cara mengkonsentrasikan pada pangsa pasar tertentu yang dikenal pasarnya cukup baik, menghususkan pemberian kredit kepada sektor/sub sektor ekonomi tertentu sesuai dengan keahlian yang dimiliki bank; atau dengan cara membatasi pertumbuhan pemberian kredit agar

tidak terkena kewajiban menambah modal karena meningkatnya assets. Namun ada beberapa bank yang menganggap bahwa pemberian kredit merupakan bagian utama untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, secara agresif mencari nasabah-nasabah baru untuk kredit konsumsi dan kredit komersial yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi.

Menurut (Tohir, 2013), kemampuan bank untuk melempar kredit ke masyarakat merupakan kegiatan operasional bank diperoleh dari aktivitas tersebut. Apabila kita melihat sisi aktiva bank, maka akan dijumpai perkiraan pinjaman yang diberikan merupakan komponen terbesar. Demikian pula jika kita melihat sisi laporan rugi laba bank, maka sebagian besar pendapatan juga berasal dari bunga pinjaman yang telah kita berikan. Kredit sebagai perkiraan terbesar dalam harta bank bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia sebagai ciri umum penggunaan dana yang berhasil dihipunkan dari masyarakat oleh suatu bank. Oleh karena presentasinya yang sangat besar tersebut, kredit memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan baik buruknya operasi suatu bank. Bank yang berhasil biasanya dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan. Apabila pengelolaan kredit yang dilakukan salah, maka sebagian besar harta bank terancam bahaya besarnya kredit bermasalah. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemberian kredit yang akhirnya dapat merugikan bank bersangkutan, maka bank akan menyusun kebijaksanaan kredit dengan memperhitungkan segala faktor dan spek yang terintegrasi meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan penetapan perencanaan, proses pemberian kredit, pengaturan wewenang, penganalisisan kredit, pengadministrasian dan pengawasan kredit.

Menurut (Ali, 2004) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya jumlah Pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat yang dihipunkan. Sesuai ketentuan dari Bank Indonesia dalam kaitan penilaian tingkat kesehatan bank, LDR yang berkisar antara 85% hingga maksimum 110% dinilai rasio LDR yang sehat. Bank dengan tingkat agresivitas yang tinggi (yang tercermin dari angka LDR-nya yang tinggi, di atas 110%) akan mengalami kesulitan likuiditas (sekali-gus penurunan rentabilitas). Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa loan dinilai sebagai *earning asset* bank yang kurang atau bahkan sangat tidak likuid. Dengan LDR yang tinggi, dapat diduga bahwa *cash in flow* dari pelunasan pinjaman dan pembayaran bunga dari debitur pada bank menjadi tidak sebanding dengan kebutuhan untuk memenuhi *cash outflow* penarikan dana-dana masyarakat dan deposito jatuh waktu.

Dapat diduga dengan LDR yang tinggi, bank secara potensial dapat mengalami kesulitan likuiditas.

Menurut (Riyadi, 2006), Rasio LDR adalah perbandingan antara Total Kredit yang Diberikan dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat

dihimpun oleh bank. LDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Maksimal LDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia sebesar 110%. Sebelum terjadi krisis moneter, jika menggunakan rumus seperti tersebut di atas dampaknya banyak bank yang akan LDR-nya mencapai di atas 110%, hal ini berakibat pada penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan menjadi tidak sehat. Untuk itu Bank Indonesia membuat kebijakan bahwa dalam perhitungan LDR murni sebagaimana tersebut di atas, digunakan perhitungan LDR *Extended* (LDR yang diperluas), di mana dana yang diterima bank terdiri atas Dana Pihak Ketiga ditambah dengan Kewajiban Segera Lainnya dan Modal Inti.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), salah satu faktor penilaian likuiditas menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) untuk menggambarkan berapa jumlah dana yang dimiliki telah disalurkan untuk kredit diukur dengan menggunakan parameter sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Kredit yang diberikan meliputi:

1. Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian sindikasi yang dibiayai bank lain.
2. Penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit yang diberikan jangka waktu lebih 3 bulan.
3. Penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit dalam rangka sindikasi.

Dana yang diterima:

1. Deposito dan Tabungan masyarakat
2. Pinjaman bukan dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan (di luar pinjaman subordinasi)
3. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan
4. Modal Inti
5. Modal Pinjaman

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode pustaka, dan pengkajian Data sekunder mengenai perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit BPR secara Nasional periode tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, bersumber dari Laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Volume 15 Nomor 07 bulan Juni 2017 yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan, dan regulasi yang berlaku. Penulis melakukan analisis *trend* berdasarkan data yang tersedia kemudian dilakukan interpretasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Penghimpunan Dana BPR Secara Nasional

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat untuk keperluan penyaluran kredit dan pemenuhan kebutuhan likuiditas lainnya, sehingga asset dan profit meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut, BPR harus memiliki struktur pendanaan dan sumber dana dari eksternal yang kuat dan cenderung stabil.

Kinerja penghimpunan dana BPR selama tiga tahun setengah terlihat pada tabel di bawah ini:

Dalam Miliar Rp.

Sumber Dana	Periode			
	2014	2015	2016	2017 *
Deposito	39,919	46,307	51,977	54,465
Tabungan	18,831	20,959	23,748	23,389
Antar Bank Pasiva	2,006	2,973	3,617	3,778
Pinjaman yang diterima	13,386	13,460	13,613	13,988
Kewajiban Segera	452	586	667	956
Jumlah	74,594	84,285	93,622	96,576
Pertumbuhan (Angka)		9,692	9,337	2,953
Pertumbuhan (%)		13.0%	11.1%	3.2%

* Posisi Juni 2017

Tabel 1. Kinerja Penghimpunan Dana BPR Tahun 2014 – Juni 2017

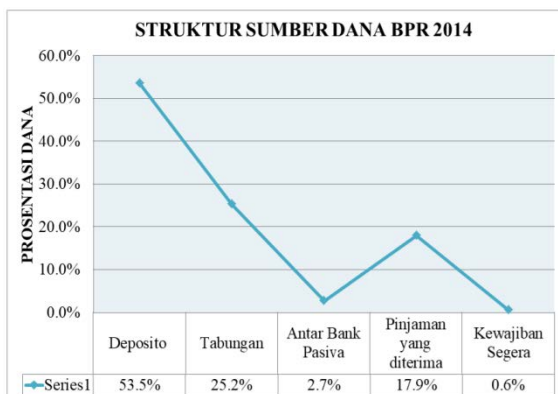
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dana BPR selama ini bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga berupa Deposito, Tabungan, dan didukung pendanaan dari Antar Bank Pasiva, Pinjaman yang Diterima serta Kewajiban Segera. Deposito berjangka BPR merupakan simpanan masyarakat yang memiliki tempo antara 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang bisa diambil setiap saat. Pendanaan Antar Bank Pasiva umumnya merupakan fasilitas pinjaman yang diterima BPR dari Bank Umum dalam bentuk *linkage*. Pendanaan dari Pinjaman yang diterima BPR dari lembaga pembiayaan di luar perbankan. Sedangkan sumber dana lain berupa kewajiban segera yang merupakan dana nasabah yang mengendap baik berupa Deposito yang jatuh waktu dan segera ditarik atau dana titipan pajak yang belum disetorkan ke kas negara.

Penghimpunan dana BPR yang bersumber dari eksternal secara jumlah dana keseluruhan *trend*-nya mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2014 jumlah dana sebesar Rp. 74.594 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp. 84.285 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 93.622 Miliar dan pada Juni tahun 2017 jumlah dana yang dapat dihimpun sebesar Rp. 96.576 Miliar.

Pertumbuhan kinerja penghimpunan dana BPR *trend*-nya cenderung menurun. Pada tahun 2015 dibanding penghimpunan dana tahun 2014 tumbuh sebesar 13,0%, sedang pada tahun 2016 dibanding penghimpunan dana tahun 2015 pertumbuhannya turun menjadi 11,1%, dan pada Juni 2017 dibanding penghimpunan dana tahun 2016 tumbuh 3,2%. Penurunan pertumbuhan dana keseluruhan pada tahun 2016 disebabkan dampak dari menurunnya pertumbuhan dana pihak ketiga deposito berjangka dari 16,0% pada tahun 2015, menjadi 12,2% pada tahun 2016. Selain itu juga terjadi penurunan pertumbuhan penggunaan fasilitas pinjaman antar bank dari 48,2% pada tahun 2015 turun menjadi 21,7% pada tahun 2016. Terdapat peningkatan pertumbuhan atas penghimpunan dana pihak ketiga tabungan dari 11,3% pada tahun 2015, tumbuh menjadi 13,3%. Sementara pada posisi Juni 2017 pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga deposito berjangka dibanding tahun 2016 hanya 4,8%. Sedang untuk pertumbuhan fasilitas pinjaman antar bank pasiva dibanding tahun 2016 tumbuh 4,4%. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada pos kewajiban yang segera dibayar, pada Juni tahun 2017 tumbuh 43,5% dibanding tahun 2016. Penghimpunan dana pihak ketiga tabungan, pada Juni 2017 turun 1,5% dibanding tahun 2016, hal ini bisa jadi dampak dari penarikan nasabah menjelang Idul Fitri. Penghimpunan dana pada tahun 2017 masih bisa mengalami perubahan pertumbuhan hingga akhir bulan Desember 2017.

Dalam hal struktur sumber dana BPR selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut ini:



Sumber : Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

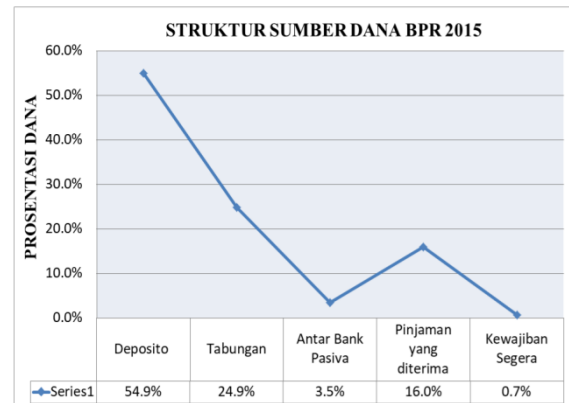
Gambar 1. Grafik Struktur Sumber Dana BPR Tahun 2014

Berdasarkan grafik pada Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa Struktur Sumber dana BPR pada tahun 2014 porsinya didominasi oleh dana masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu Deposito Berjangka di urutan pertama dan berikutnya Tabungan.

Deposito berjangka menempati porsi 53,5% dari

seluruh sumber dana. Tabungan menempati porsi 25,2% dari seluruh sumber dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi BPR telah berjalan dengan baik karena struktur dana BPR terbesar 78,7%, bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Selain dana pihak ketiga BPR didukung oleh dana dari pinjaman non bank yang porsinya menempati urutan ketiga yaitu 17,9% dari seluruh dana yang dihimpun.

Untuk memberikan gambaran struktur sumber dana BPR pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik



Sumber : Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

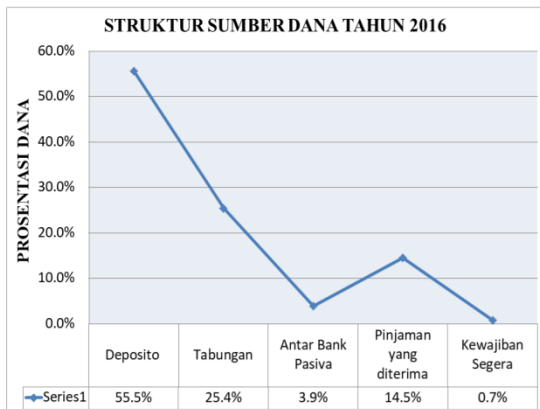
berikut ini:

Gambar 2. Grafik Struktur Sumber Dana BPR Tahun 2015

Berdasarkan grafik pada Gambar 2, Struktur Sumber dana BPR pada tahun 2015 porsi yang terbesar adalah dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu Deposito Berjangka di urutan yang pertama dan berikutnya adalah Tabungan.

Deposito berjangka menempati porsi 54,9% dari seluruh sumber dana yang dimiliki, dan ini jauh lebih besar dibanding tahun 2014 hanya 53,5%. Tabungan menempati porsi 24,9% dari seluruh sumber dana yang berarti mengalami penurunan yang mana sebelumnya adalah 25,2% dari seluruh sumber dana. Berdasarkan data tersebut telah terjadi pergeseran sumber dana, di mana BPR lebih mengandalkan dananya dari Deposito berjangka dibanding tabungan. Dari sisi stabilitas, simpanan deposito berjangka lebih stabil dibanding tabungan, sekalipun suku bunga deposito berjangka lebih tinggi dari tabungan. Kondisi ini menunjukkan fungsi intermediasi BPR masih berjalan dengan baik karena struktur dana BPR terbesar 79,8% bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Selain dana pihak ketiga BPR didukung oleh dana dari pinjaman non bank yang porsinya menempati urutan ketiga yaitu 16,0% dari seluruh dana yang dihimpun, yang artinya mengalami penurunan porsi dibanding pada tahun 2014 sebesar 17,9%.

Untuk memberikan gambaran struktur sumber dana BPR pada tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 3. Grafik Struktur Sumber Dana BPR Tahun 2016

Berdasarkan grafik pada Gambar 3, Struktur Sumber dana BPR pada tahun 2016 porsi yang terbesar masih dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu Deposito Berjangka di urutan yang pertama dan berikutnya adalah Tabungan.

Deposito berjangka menempati porsi 55,5% dari seluruh sumber dana yang dimiliki, dan ini jauh lebih meningkat dibanding tahun 2015 hanya 54,9%. Tabungan menempati porsi 25,4% dari seluruh sumber dana yang berarti mengalami peningkatan, di banding tahun 2015 adalah 24,9%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPR semakin meningkat, sehingga mereka bersedia menyimpan dananya di BPR. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa fungsi intermediasi BPR semakin baik karena struktur dana BPR terbesar 80,9% bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga. BPR juga menggunakan dana dari Pinjaman yang diterima dengan porsi dana sebesar 14,5% dari seluruh dana yang dihimpun, yang artinya mengalami penurunan porsi sumber dana dibanding tahun 2015 sebesar 16,0%.

Struktur sumber dana BPR pada tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber : Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 4. Grafik Struktur Sumber Dana BPR

Tahun 2017

Berdasarkan grafik pada Gambar 4, Struktur Sumber dana BPR pada tahun 2017 porsi yang terbesar masih dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu Deposito Berjangka di urutan yang pertama dan berikutnya adalah Tabungan.

Deposito berjangka menempati porsi 56,5% dari seluruh sumber dana yang dimiliki, dan ini jauh lebih meningkat dibanding tahun 2016 hanya 55,5%. Tabungan menempati porsi 24,2% dari seluruh sumber dana yang berarti mengalami penurunan, di banding tahun 2016 adalah 25,4%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPR semakin meningkat, sehingga mereka bersedia menyimpan dananya di BPR. Jika tabungan mengalami penurunan bisa jadi disebabkan karena adanya penarikan dana terkait Idul Fitri atau tahun ajaran baru. Kondisi ini masih menunjukkan bahwa fungsi intermediasi BPR semakin baik karena struktur dana BPR terbesar 80,7% bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga. BPR menggunakan dana dari Pinjaman yang diterima dengan porsi 14,5% dari seluruh dana yang dihimpun, sama dengan tahun 2016.

Berdasarkan uraian terkait penghimpunan dana BPR selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, dapat dijelaskan bahwa operasional BPR sumber dananya mayoritas berasal dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Fungsi intermediasi antar BPR dengan pemilik dana semakin baik, hal ini bisa disebabkan karena meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada BPR, dana mereka pun dijamin oleh LPS dan BPR memiliki produk-produk dana yang menarik, serta pelayanan BPR yang semakin baik. Kendala dalam hal IT tentu saja menjadi catatan tersendiri, namun BPR memiliki kekuatan dalam memberikan pelayanan terbaiknya melalui kualitas pelayanan personal dari seluruh SDM yang kompeten.

Dalam hal sumber dana BPR dari intern dalam bentuk Modal selama tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Kinerja Permodalan BPR Tahun 2014 – Juni 2017

Dalam Miliar Rp.

Sumber Dana	Periode			
	2014	2015	2016	2017 *
Modal Disetor	8,227	9,550	10,656	11,299
Cadangan	1,819	2,079	2,351	2,675
L/R Tahun Berjalan	2,682	2,755	2,936	1,523
L/R Tahun Lalu	978	1,289	1,755	2,394
Jumlah	13,706	15,673	17,699	17,891
Pertumbuhan (Angka)		1,967	2,026	193
Pertumbuhan (%)		14.4%	12.9%	1.1%

* Posisi Juni 2017

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pada data statistik di atas, menunjukkan bahwa permodalan BPR *trend*-nya dari tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 terus mengalami peningkatan. Modal disetor yang pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.227 Miliar, pada Juni 2017 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 17.891 Miliar. Hal ini dampak dari diperlakukannya peraturan tentang penyediaan modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah modal disetor yang terus mengalami peningkatan ditambah dengan jumlah laba yang terus meningkat menjadikan struktur permodalan BPR semakin kokoh, terlebih saat ini semakin kompleks risiko yang dihadapi BPR, di antaranya adalah risiko pemberian kredit, seiring dengan semakin ekspansifnya BPR menyalurkan kredit diberbagai sektor ekonomi. Semakin kuatnya struktur permodalan BPR menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan dana semakin meningkat dan dengan keikutsertaan dalam program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menjadikan nasabah terus tertarik untuk menyimpan dananya di BPR. Selain itu, semakin besar modal, tingkat pelayanan BPR juga semakin baik, sebab BPR memiliki kantor operasional sendiri yang memadai dengan dilengkapi fasilitas teknologi yang mumpuni sehingga pelayanan BPR semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan semakin baiknya pelayanan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat, dapat berdampak pada meningkatnya sumber dana pihak ketiga dan penyaluran kredit, yang menjadikan BPR terus tumbuh secara sehat, secara efisien, sehingga memiliki daya saing yang kuat dalam era persaingan lembaga keuangan yang semakin kompetitif.

3.2. Kinerja Penyaluran Kredit BPR Secara Nasional

Kegiatan penghimpunan dana BPR tidak lain bertujuan agar BPR dapat melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga berperan dalam membangun perekonomian sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Selain untuk meningkatkan jumlah aktiva produktif dan asset keseluruhan, dengan menyalurkan kredit BPR dapat memperoleh pendapatan operasional dan profit yang terus meningkat.

Mengingat kredit merupakan asset BPR yang terbesar dan risikonya tinggi, maka setiap BPR harus menerapkan manajemen risiko yang baik. BPR harus memiliki kebijakan kredit, di antaranya mengatur mengenai proses pemberian kredit dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan proses analisa, pemantauan dan pembinaan nasabah serta melakukan pengawasan kredit secara konsisten. Hal ini dilakukan agar kredit yang diberikan terseleksi dengan baik sehingga kredit bermasalah yang dapat

merugikan BPR dapat dicegah sejak awal. Dengan melakukan proses kredit secara benar sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku, maka BPR akan memperoleh peningkatan pendapatan bunga dan profit usaha. Kondisi ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada semua nasabah, termasuk penyediaan likuiditas untuk pembayaran kewajiban kepada nasabah yang menyimpan di BPR. Pelayanan dan pembayaran kewajiban yang baik akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan nasabah penyimpan, dan akibatnya jumlah dana semakin meningkat, sehingga peluang menyalurkan kredit juga semakin besar.

Untuk mengetahui kinerja penyaluran kredit selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Kinerja Penyaluran Kredit BPR
Tahun 2014 sampai dengan Juni 2017

Dalam Miliar Rp.

Penggunaan Dana	Periode			
	2014	2015	2016	2017 *
Kredit yang diberikan	68,391	74,807	81,684	87,389
Jumlah	68,391	74,807	81,684	87,389
Pertumbuhan (Angka)		6,416	6,877	5,706
Pertumbuhan (%)		9.4%	9.2%	7.0%

* Posisi Juni 2017

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, jumlah penyaluran kredit BPR setiap tahun *trend*-nya terus mengalami peningkatan. Pertumbuhannya sedikit menurun pada tahun 2016 dibanding tahun 2015. Pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juni penyaluran kredit tumbuh 7% dibanding tahun 2016. BPR masih memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan penyaluran kreditnya secara sehat.

Pada umumnya, BPR menyalurkan kredit untuk keperluan Modal Kerja, Konsumtif dan Investasi. Untuk bisa melakukan ekspansi kredit, BPR memiliki kiat-kiat menarik yang menjadikan masyarakat bersedia menjadi nasabah di BPR. BPR memiliki produk kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti untuk penambahan modal usaha kecil, baik disektor perdagangan dan jasa bahkan BPR di daerah juga menyalurkan kredit pada sektor pertanian dan perkebunan. BPR juga memberikan kredit untuk keperluan konsumtif seperti kredit renovasi rumah, kredit pemilikan rumah, kredit pembelian kendaraan dan kredit pendidikan. Kredit konsumtif sangat membantu masyarakat yang kondisinya sedang mendesak dengan sumber penghasilan dari gaji atau usaha lainnya. Di samping itu BPR juga memberikan kredit Investasi kecil untuk pengembangan tempat usaha atau pembelian

kendaraan operasional usaha. Proses kredit di BPR relatif cepat dengan proses yang praktis sehingga persyaratan mudah dipenuhi.

Kredit yang disalurkan BPR bersumber pada dana yang dihimpun baik dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman yang diterima serta Modal Inti yang dimiliki BPR. Untuk mengetahui berapa besar dana yang dimiliki BPR digunakan untuk penyaluran kredit, dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4. Kinerja Penyaluran Kredit berdasarkan Rasio LDR

Dalam Miliar Rp.

Keterangan	Periode			
	2014	2015	2016	2017 *
LDR	79.79%	77.81%	76.24%	79.03%
Total Kredit	68,391	74,807	81,684	87,389
Penghimpunan Dana	72,914	81,908	90,997	93,621
Modal Inti	12,801	14,232	16,147	16,963

* Posisi Juni 2017

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pada rasio LDR atau *Loan to Deposit Ratio* di atas, menunjukkan bahwa *trend*-nya cenderung stabil dikisaran 76% sampai dengan 79%. Rasio ini menunjukkan bahwa BPR masih memiliki dana yang cukup tersedia sebagai likuiditas untuk penyaluran kredit. BPR masih memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi kredit untuk meningkatkan jumlah pendapatan operasional. Pada tahun 2016 sedikit terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan, tetapi pada Juni 2017 mulai menunjukkan adanya peningkatan dan hampir menembus angka 80%.

Jika BPR tidak menggunakan dana yang dimiliki untuk penyaluran kredit secara maksimal, dengan ditandai rasio LDR di atas 85%, maka BPR akan terbebani biaya bunga atas dana yang dihimpun. Biaya dana yang tertinggi adalah dana atas pinjaman diterima antar bank atau bukan bank. Pada umumnya suku bunga pinjaman diterima, di atas suku bunga deposito berjangka dan tabungan. Meningkatnya penghimpunan deposito berjangka juga memiliki beban biaya dana yang cukup tinggi, sebab rata-rata suku bunga deposito BPR lebih tinggi dari bunga deposito di bank umum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka BPR harus menciptakan produk yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan proses yang mudah tetapi tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian. BPR harus memastikan kelancaran kredit agar saat dibutuhkan untuk membayar kewajiban kepada penyimpan dana atau kepada kreditur dapat berjalan lancar sehingga kepercayaan semakin meningkat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang melaksanakan fungsi intermediasi, dengan kegiatan usaha sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
2. Sumber dana eksternal BPR berasal dari dana pihak ketiga yaitu berupa deposito berjangka, tabungan, pinjaman antar bank berupa fasilitas *linkage*, pinjaman yang diterima non bank dan kewajiban segera dibayar.
3. Kinerja penghimpunan dana BPR *trend*-nya meningkat dari tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 di mana mayoritas dana bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) antar bank.
4. Struktur dana BPR yang terbesar persinya adalah bersumber dari Deposito berjangka dan tabungan di mana keduanya adalah dana pihak ketiga masyarakat, sehingga BPR dinilai telah melaksanakan fungsi intermediasi sebagai lembaga keuangan bank dengan baik.
5. Kinerja penyaluran kredit BPR sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, *trend*-nya terus mengalami peningkatan, sehingga BPR memiliki peluang untuk meningkatkan aktiva produktif, pendapatan dan profit.
6. BPR pada tahun 2017 masih memiliki peluang yang besar untuk terus meningkatkan ekspansi kreditnya, sebab rasio LDR (*Loan to deposit ratio*) masih dibawah 85% di mana jumlah dana yang dimiliki BPR masih cukup tersedia.

REFERENSI

- Ali, Masyhud (2004). *Asset Liability Management*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ikatan Bankir Indonesia (2016). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). *Statistik Perbankan Indonesia Volume 15 Nomor 07 Juni 2017*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Riyadi, Selamat (2006). *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soedarto (2007). *Manajemen Risiko untuk BPR*. Jakarta: Palem Jaya.
- Triandaru, Sigit (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tohir, Noel Chabannel (2012). *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Riwayat Penulis :

Wangsit Supeno, SE, MM, lahir di Jakarta, saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Akademi Manajemen dan Informatika (AMIK) BSI Jakarta.

Selain mengajar di kampus BSI Jakarta, saat ini saya sebagai seorang **Trainerpreneurship** dan juga menjadi Fasilitator Tamu untuk Pelatihan bidang BPR pada **Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta**.

Sebagai Trainer, saya memiliki Sertifikat Profesi dari **Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)** No.Reg. TRN 646-000033-2017. Saya juga seorang Pemerhati industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Saya telah menulis e-book berjudul "**Motivasi Pribadi Berkarakter**", yang telah dipublikasikan pada website wangsitsupeno.com.

Saya mendapatkan sertifikat sebagai Penulis 29 Naskah Terbaik Kompetisi Esai Hut BSI ke 29 dengan sertifikat Nomor 608/5.05/BSI/III/2017.

Saya telah menulis jurnal ilmiah pada majalah **Widyacipta** kampus BSI Jakarta sebagai berikut; **Analisis Dampak Risiko Kredit Bermasalah terhadap Return on Asset pada Bank Perkreditan Rakyat** (Vol. VII No. 1 Maret 2015), **Analisis Program Pencegahan Tindak Pidana pencucian uang (Money laundering) studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat** (Vol. VIII No. 1 Maret 2016), **Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pencegahan Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat** (Vol. VIII No. 2 September 2016), **Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat** (Vol. I No. 1 Maret 2017).